

## ANALISIS KARTU INDONESIA PINTAR MELALUI PERSPEKTIF GEORGE C. EDWARDS III DI KECAMATAN GRINGSING

Sumarno<sup>1(a)</sup>, Hanif Nurcholis<sup>2(b)</sup>, Augustin Rina Herawati<sup>(c)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka

<sup>a)</sup>sumarnoanies@gmail.com, <sup>b)</sup>hanif@ecampus.ut.ac.id, <sup>c)</sup>agustin.rina@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

26-07-2025

Diterbitkan Online:

31-03-2026

#### Kata Kunci:

Kebijakan, Analisis, Kartu  
Indonesia Pintar, KIP

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan program PIP di wilayah tersebut menunjukkan sejumlah permasalahan, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima, tidak optimalnya proses implementasi, serta rendahnya efektivitas program di jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini berfokus pada empat faktor utama implementasi kebijakan menurut teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai indikator keberhasilan implementasi program. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi data yang meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam penyaluran bantuan PIP. Ditinjau dari perspektif George C. Edwards III ada 4 faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Penelitian ini menyimpulkan perbaikan implementasi PIP memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan komunikasi kebijakan, penguatan kapasitas pelaksana dan penerima, reformasi prosedur birokrasi, serta integrasi program bantuan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan perbaikan tersebut, Program Indonesia Pintar diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pemerataan dan kualitas pendidikan di Kecamatan Gringsing.

#### Keywords:

Policy, Analysis, Indonesia  
Pintar Card, KIP

#### Corresponding Author:

sumarnoanies@gmail.com

### ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in Gringsing District, Batang Regency. Based on field findings, the implementation of the PIP program in this area shows several problems, including mistargeting of beneficiaries, suboptimal implementation processes, and low program effectiveness at the elementary, junior secondary, and senior secondary education levels. The study focuses on four main factors of policy implementation according to George C. Edwards III's theory—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—as indicators of implementation success. The research employs a qualitative approach using data triangulation techniques, including observation, documentation, and in-depth interviews. The findings indicate disparities in the distribution of PIP assistance. From the perspective of George C. Edwards III, four factors contribute to these disparities: (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure. The study concludes that improving PIP implementation requires an integrated approach encompassing strengthened policy communication, enhanced capacity of implementers and beneficiaries, bureaucratic procedure reform, and integration of assistance programs with efforts to improve educational quality. With these improvements, the Program Indonesia Pintar is expected

*to have a more significant impact on educational equity and quality in Gringsing District.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v8i1.1340>

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan kompetitif di era global. Namun, kenyataannya, tidak semua anak Indonesia memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Berbagai kendala seperti keterbatasan ekonomi, minimnya fasilitas pendidikan, serta ketimpangan wilayah masih menjadi penghambat utama dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejak tahun 2015 sebagai bagian dari strategi afirmatif dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera 2015 (Pendidikan et al., 2018). KIP dirancang untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada peserta didik dari jenjang SD hingga SMA/SMK atau sederajat, guna mengurangi angka putus sekolah dan mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah, khususnya di kelompok usia sekolah menengah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020). Selain itu, KIP menjadi instrumen penting dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun, serta upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada bidang pendidikan yang inklusif dan merata (Sufni, 2024).

Meskipun secara nasional KIP telah menunjukkan berbagai capaian positif, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah klasik seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan distribusi bantuan, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat masih banyak ditemukan, terutama di wilayah terpencil atau rural seperti Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan

nelayan turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

Menurut Dunn (2003) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik. Evaluasi implementasi kebijakan menjadi salah satu tahapan penting untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh proses implementasinya di lapangan. Hal ini diartikan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai pemanfaatan strategis dari sumber daya saja, tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam dan sangat menentukan (Donahue, 2003). Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards (1980) menyebutkan bahwa empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, penting untuk melihat pelaksanaan kebijakan KIP di daerah seperti Gringsing secara komprehensif melalui perspektif implementasi kebijakan publik.

Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dipilih sebagai lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan empiris. Pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Gringsing mencapai 63.664 jiwa, dengan estimasi penduduk miskin atau rentan miskin berkisar antara 10.000–13.000 jiwa atau sekitar 16–20% dari total penduduk kecamatan (BPS Kabupaten Batang, 2024; Pemerintah Kabupaten Batang, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat masih relatif tinggi. Kedua, secara struktural Kecamatan Gringsing telah memiliki ketersediaan jenjang pendidikan yang relatif lengkap, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA), serta akses ke pendidikan tinggi di wilayah sekitarnya (BPS Kabupaten Batang, 2024). Namun demikian,

berdasarkan data BPS, mayoritas tingkat pendidikan penduduk masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar (BPS Kabupaten Batang, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai belum sepenuhnya diikuti oleh tingginya partisipasi dan keberlanjutan pendidikan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya faktor ekonomi keluarga yang membatasi kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, pemerintah telah mengupayakan peningkatan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah dalam rangka mendukung program wajib belajar 12 tahun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Gringsing pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis proses implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Gringsing Tahun 2024, 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan KIP di Kecamatan Gringsing. 3. Mengevaluasi efektivitas kebijakan KIP dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di Kecamatan Gringsing. Fokus utama penelitian terletak pada pemetaan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan KIP di tingkat lokal, serta evaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi kebijakan pendidikan, sekaligus rekomendasi praktis bagi perbaikan program di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu kasus dalam konteks kehidupan nyata dengan menggunakan berbagai sumber data (Creswell, 2014) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Gringsing. Pendekatan ini

dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi proses pelaksanaan kebijakan dari sudut pandang pelaksana dan penerima manfaat. Pola pikir yang digunakan bersifat induktif, dengan penekanan pada pengalaman subjek penelitian, bukan pembuktian hipotesis.

Data diperoleh melalui informan dan dokumen. Dokumen berupa arsip dan data pelaksanaan KIP di sekolah. Daftar informan sesuai tabel berikut:

**Tabel 1. Informan Penelitian**

Jabatan	Nama Informan
Kepala Sekolah SMA	Wachid Mucharom, S. Pd., M. Pd
Operator KIP SMA	Eri Wibowo, SM
Siswa penerima	Febrian Lorenza
Kepala Sekolah SMP	Siti Khomariyah, M. Pd
Operator SMP	Lukman Zulfikar, A.Md

Pengambilan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih subjek yang memiliki pengetahuan mendalam terkait topik penelitian.

Instrumen yang digunakan mencakup: Pedoman wawancara semi-terbuka berdasarkan lima aspek: komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan efektivitas kebijakan; Pedoman observasi: mengamati kondisi lapangan, interaksi pelaksana, dan dokumentasi program; dan Dokumentasi: memverifikasi data tertulis dan arsip sekolah. Instrumen pendukung meliputi: lembar observasi, lembar wawancara, daftar periksa dokumen, kamera, dan alat perekam.

Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi partisipatif: peneliti terlibat langsung dalam mengamati pelaksanaan KIP di lapangan; Wawancara mendalam: dilakukan dengan informan kunci, utama, dan pendukung; Dokumentasi: mengumpulkan arsip dan dokumen resmi terkait pelaksanaan KIP.

Analisis data menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014), yang terdiri dari: Pengumpulan data Reduksi data: menyederhanakan dan memfokuskan data yang relevan; Penyajian data: merancang tampilan data secara sistematis; Penarikan kesimpulan dan verifikasi: memastikan kesimpulan berdasarkan data yang valid dan teruji; dan Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan dan reflektif untuk

menangkap makna mendalam dari pelaksanaan kebijakan KIP di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan model implementasi kebijakan Edwards III, permasalahan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Gringsing terutama dipengaruhi oleh empat aspek utama. Pada aspek komunikasi, sosialisasi program belum efektif sehingga masyarakat tidak memahami tujuan dan mekanisme pemanfaatan bantuan. Pada aspek sumber daya, keterbatasan SDM pelaksana, rendahnya literasi keuangan penerima, serta hambatan akses layanan perbankan menyebabkan program tidak berjalan optimal. Pada aspek disposisi, persepsi masyarakat yang masih memandang KIP sebagai bantuan konsumtif serta rendahnya motivasi pendidikan keluarga miskin menghambat dampak program terhadap kualitas pendidikan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, prosedur administratif yang kompleks, kelemahan sistem pendataan DTKS, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan rendahnya akuntabilitas program. Dengan demikian, kendala implementasi PIP di Gringsing bersifat multidimensional dan memerlukan perbaikan terpadu pada keempat aspek implementasi kebijakan.

### Aspek Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan faktor fundamental dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Gringsing. Berdasarkan hasil penelitian, proses sosialisasi program kepada masyarakat sasaran belum berlangsung secara optimal. Sosialisasi masih bersifat terbatas, tidak merata antar jenjang pendidikan, dan cenderung pasif terutama pada tingkat sekolah dasar. Banyak orang tua dan siswa tidak memahami bahwa KIP merupakan bantuan pendidikan yang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan akademik, melainkan dipersepsikan sebagai bantuan sosial umum untuk kebutuhan rumah tangga.

Keterbatasan komunikasi ini juga terlihat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria penerima, prosedur pendaftaran, mekanisme pencairan, serta tata cara pemanfaatan dana. Operator sekolah seringkali hanya menyampaikan informasi administratif dasar tanpa penjelasan mendalam mengenai tujuan program, hak dan kewajiban

penerima, serta konsekuensi penyalahgunaan dana. Kondisi ini menyebabkan kesalahan persepsi yang berdampak pada rendahnya partisipasi pendaftaran serta pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.

Selain itu, komunikasi kebijakan belum berkelanjutan. Sosialisasi umumnya hanya dilakukan pada awal pendataan atau saat pembagian informasi awal, tanpa adanya edukasi lanjutan mengenai penggunaan dana, literasi keuangan, atau pemantauan pemanfaatan bantuan. Akibatnya, penerima bantuan tidak memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan dana pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi kebijakan di Gringsing belum memenuhi prinsip kejelasan, konsistensi, dan kontinuitas sebagaimana dikemukakan Edwards III.

Namun demikian, pada jenjang SMA ditemukan praktik komunikasi yang relatif lebih baik, terutama melalui peran wali kelas yang aktif menyampaikan informasi melalui pertemuan orang tua dan media komunikasi digital seperti WhatsApp. Praktik ini terbukti meningkatkan pemahaman siswa dan orang tua terhadap tujuan program. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh inisiatif aktor pelaksana di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, kelemahan komunikasi kebijakan di Kecamatan Gringsing menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan regulasi PIP dan pemahaman masyarakat penerima. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sosialisasi, edukasi publik, dan komunikasi berkelanjutan menjadi kebutuhan utama dalam implementasi program.

Sesuai Permendikbud No. 10 Tahun 2020 Pasal 18 dan UU No. 14 Tahun 2008, pemerintah wajib menyosialisasikan program PIP secara terbuka. Namun, di tingkat SD, sosialisasi masih pasif dan terbatas. Operator sekolah sering tidak menyampaikan informasi secara menyeluruh karena beban kerja tinggi dan kurangnya pelatihan. Akibatnya, banyak siswa tidak terdaftar sebagai penerima karena orang tua tidak mengetahui hak dan prosedur pengajuan. Oleh karena itu, perlu strategi komunikasi yang aktif dan sistematis agar informasi tersampaikan merata ke seluruh calon penerima manfaat.

Dampaknya, hasil temuan secara empirik masih banyak masyarakat yang tidak memahami tujuan, kriteria, dan cara

pemanfaatan KIP. Sejumlah penelitian mendukung temuan ini, menyoroti rendahnya sosialisasi, sulitnya akses ke bank, serta pemahaman orang tua yang masih minim.

Secara teoritis, ketidakefisienan ini sesuai dengan pandangan Wilson (1989) mengenai birokrasi yang menghadapi keterbatasan struktural dan manajerial. Temuan di lapangan juga bertentangan dengan regulasi seperti Permendikbud No. 10 Tahun 2020 dan UU No. 14 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya sosialisasi dan keterbukaan informasi publik terkait program pendidikan.

### Aspek Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan kapasitas implementasi kebijakan. Dalam konteks Program Indonesia Pintar di Kecamatan Gringsing, keterbatasan sumber daya terlihat pada aspek sumber daya manusia, kapasitas penerima, serta infrastruktur pendukung.

Dari sisi sumber daya manusia pelaksana, operator sekolah dan aparat desa yang terlibat dalam pendataan dan verifikasi penerima PIP masih menghadapi keterbatasan kompetensi teknis serta beban kerja administratif yang tinggi. Pembaruan data DTKS sering tidak dilakukan secara rutin karena keterbatasan waktu, pelatihan, dan dukungan sistem. Akibatnya, data penerima tidak selalu akurat dan membuka peluang kesalahan sasaran bantuan.

Dari sisi penerima manfaat, rendahnya literasi keuangan orang tua dan siswa menjadi kendala signifikan. Pada jenjang sekolah dasar, dana PIP umumnya dikelola oleh orang tua, namun sering dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga akibat tekanan ekonomi keluarga. Pada jenjang SMP dan SMA, dana diterima langsung oleh siswa, tetapi sebagian digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas penerima dalam mengelola bantuan pendidikan masih rendah.

Selain itu, faktor geografis dan infrastruktur juga memengaruhi implementasi program. Lokasi bank penyalur yang relatif jauh dari beberapa desa di Gringsing menyebabkan siswa harus menempuh perjalanan dan antre dalam waktu lama untuk mencairkan dana. Proses pencairan sering mengharuskan siswa meninggalkan kegiatan belajar, bahkan menanggung biaya transportasi tambahan.

Hambatan ini mengurangi aksesibilitas program dan berpotensi menurunkan manfaat bantuan.

Keterbatasan sumber daya tersebut menunjukkan bahwa implementasi PIP di wilayah pedesaan seperti Gringsing memerlukan dukungan kapasitas yang lebih besar, baik dalam bentuk pelatihan pelaksana, edukasi penerima, maupun penyediaan akses layanan yang lebih dekat dan efisien.

Menurut teori Reinventing Government oleh Osborne & Gaebler (1992), efektivitas KIP dapat ditingkatkan melalui reformasi birokrasi menjadi lebih desentralistik dan hasil-oriented. Permasalahan implementasi KIP mencerminkan perlunya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Secara hukum, pelaksanaan PIP diatur dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2020 untuk SD hingga SMA/SMK, dan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2021 untuk perguruan tinggi. Namun, kesenjangan masih terjadi antara regulasi dan implementasi di lapangan.

### Aspek Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan orientasi nilai para pelaksana serta penerima kebijakan. Dalam implementasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Gringsing, dimensi disposisi menunjukkan variasi antara aktor pelaksana dan penerima manfaat.

Pada tingkat masyarakat penerima, masih terdapat persepsi bahwa KIP merupakan bantuan konsumtif jangka pendek, bukan investasi pendidikan jangka panjang. Persepsi ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang lemah, prioritas kebutuhan dasar yang mendesak, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan. Akibatnya, motivasi belajar siswa penerima bantuan tidak selalu meningkat secara signifikan, dan pemanfaatan dana belum sepenuhnya diarahkan pada kebutuhan akademik.

Namun demikian, pada tingkat sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Gringsing, ditemukan disposisi pelaksana yang positif. Guru dan wali kelas menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pendampingan, motivasi, serta pengawasan penggunaan dana KIP. Mereka tidak hanya berperan administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembina siswa penerima bantuan. Sikap ini membantu menjaga pemanfaatan dana agar

lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesadaran siswa terhadap tujuan program.

Perbedaan disposisi antara penerima dan pelaksana menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, komitmen, dan orientasi nilai para aktor. Jika penerima memandang bantuan sebagai konsumsi, maka dampak pendidikan menjadi terbatas. Sebaliknya, jika pelaksana memiliki komitmen kuat, maka efektivitas program dapat meningkat pada tingkat lokal.

Permendikbud No. 10 Tahun 2020 Pasal 14–16 menegaskan peran sekolah dalam pendataan, pengusulan, dan pendampingan siswa. Di SDN 02 Kutosari, sosialisasi bersifat aktif tapi tidak berkelanjutan. Di SMPN 3 Gringsing, dilakukan beberapa kali dan cukup menumbuhkan kesadaran siswa. Di SMAN 1 Gringsing, peran wali kelas sangat efektif dalam menyampaikan informasi melalui berbagai media, termasuk WhatsApp. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem komunikasi yang terorganisir dan berkelanjutan agar semua pihak memperoleh informasi secara merata.

Permendikbud No. 10 Tahun 2020 Pasal 6–7 menyebutkan bahwa data Dapodik menjadi dasar penetapan penerima PIP. Namun, praktik di lapangan menunjukkan manipulasi melalui surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan tanpa verifikasi ketat, seringkali karena nepotisme. Akibatnya, banyak penerima tidak layak yang mendapatkan bantuan, sedangkan yang benar-benar membutuhkan terabaikan. Diperlukan verifikasi independen dan edukasi bagi aparat desa untuk menjamin keadilan dan ketepatan sasaran.

Selanjutnya, Analisis Teoretis dan Penelitian Pendukung yaitu dari Indriani (2023) dan Setyawati (2018) menyoroti lemahnya komunikasi, keterbatasan SDM, dan penyalahgunaan dana sebagai hambatan implementasi KIP. Menurut teori Edwards (1980), kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh lemahnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Reformasi implementasi KIP harus mencakup: komunikasi publik dua arah, peningkatan kapasitas pelaksana, kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan yang terbuka.

Meskipun Program KIP dirancang untuk membantu siswa dari keluarga miskin agar tetap bersekolah, implementasinya masih dihambat oleh persoalan administratif, sosial ekonomi, budaya lokal, dan sistem birokrasi yang kaku.

Perlu peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta reformasi kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Gringsing masih menunjukkan berbagai kendala prosedural dan kelembagaan. Proses administratif program dinilai kompleks dan berlapis, mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima, hingga pencairan dana melalui bank penyalur. Prosedur yang panjang dan persyaratan dokumen yang banyak menyebabkan keterlambatan pencairan serta menurunkan aksesibilitas program bagi keluarga miskin.

Sistem pendataan berbasis DTKS dan Dapodik juga belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah desa, sekolah, dan instansi terkait. Pembaruan data tidak selalu dilakukan secara berkala, sehingga masih terdapat penerima yang tidak layak maupun keluarga miskin yang tidak terdaftar. Selain itu, praktik penerbitan surat keterangan tidak mampu tanpa verifikasi ketat membuka peluang manipulasi data.

Pengawasan dan mekanisme sanksi terhadap penyimpangan penggunaan dana juga belum berjalan efektif. Masih ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan pendidikan tanpa penindakan tegas. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas implementasi program belum optimal.

Di sisi lain, regulasi nasional belum memberikan petunjuk teknis operasional yang cukup rinci untuk kondisi lapangan di daerah pedesaan. Akibatnya, implementasi program antar sekolah menjadi bervariasi tergantung kapasitas masing-masing pelaksana. Struktur birokrasi yang kaku dan kurang adaptif ini menyebabkan implementasi kebijakan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan lokal masyarakat Gringsing.

Dari sudut pandang ini, KIP masih mengalami kegagalan implementasi karena belum mencapai tujuan secara optimal dan tingkat pelaksanaannya rendah. Solusi Umum Terintegrasi Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan: Evaluasi dan revisi kebijakan secara berkala berdasarkan data lapangan dan hasil riset. Kolaborasi multisektor antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan LSM untuk memperkuat pelaksanaan dan pengawasan. Sistem insentif bagi sekolah yang

berhasil mengelola beasiswa secara akuntabel dan meningkatkan prestasi siswa.

### Model Konseptual Implementasi PIP di Kecamatan Gringsing (Adaptasi Edwards III)

Berdasarkan temuan penelitian, model implementasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Gringsing dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2. Model Implementasi Program KIP di Kecamatan Gringsing**

Faktor	Kondisi Utama	Dampak terhadap PIP
<b>Komunikasi</b>	Sosialisasi terbatas dan informasi tidak merata sehingga masyarakat menganggap PIP sebagai bantuan uang biasa.	Dana sering digunakan tidak khusus untuk pendidikan sehingga tujuan program kurang tercapai.
<b>Sumber Daya</b>	SDM sekolah terbatas, literasi keuangan orang tua rendah, dan akses bank sulit.	Pendampingan dan pemanfaatan dana PIP tidak optimal untuk kebutuhan sekolah siswa.
<b>Disposisi</b>	Motivasi pendidikan sebagian penerima rendah, tetapi komitmen guru tinggi.	Pemanfaatan dana dan dampak PIP berbeda-beda antar siswa penerima.
<b>Struktur Birokrasi</b>	Administrasi rumit, data penerima kurang akurat, dan pengawasan lemah.	Terjadi ketidaktepatan sasaran dan kontrol penggunaan dana kurang efektif.

### Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Temuan Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Gringsing, diketahui bahwa

efektivitas program masih dipengaruhi oleh kelemahan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi penerima, serta struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, serta dampak program terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat miskin. Adapun rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah sebagai berikut.

#### a) Penguatan Komunikasi dan Sosialisasi Program

Pemerintah daerah dan satuan pendidikan perlu meningkatkan sosialisasi Program Indonesia Pintar secara aktif, berkelanjutan, dan merata kepada orang tua serta siswa penerima. Sosialisasi tidak hanya berfokus pada prosedur pencairan dana, tetapi juga pada pemahaman tujuan PIP sebagai bantuan khusus pendidikan. Edukasi literasi keuangan penggunaan dana pendidikan perlu diberikan agar bantuan dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah seperti perlengkapan belajar, transportasi, dan biaya penunjang pendidikan lainnya. Selain itu, pemanfaatan media digital sekolah seperti grup komunikasi orang tua, media sosial sekolah, dan papan informasi daring dapat memperluas jangkauan penyebaran informasi program secara efektif di wilayah Kecamatan Gringsing.

#### b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelaksana dan Penerima

Peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana dan penerima perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan SDM serta rendahnya literasi administrasi dan keuangan. Pelatihan bagi operator sekolah dan aparat desa mengenai pendataan, verifikasi, serta pemutakhiran data penerima bantuan akan meningkatkan akurasi sasaran PIP. Di sisi penerima, pendampingan penggunaan dana bagi siswa dan orang tua perlu dilakukan agar bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pendidikan. Penyederhanaan akses pencairan melalui layanan kolektif sekolah, seperti fasilitasi pembukaan rekening dan pencairan terjadwal, juga penting untuk mengatasi hambatan akses layanan perbankan di wilayah pedesaan.

#### c) Penguatan Disposisi dan Motivasi Pendidikan Penerima

Keberhasilan Program Indonesia Pintar tidak hanya ditentukan oleh bantuan finansial,

tetapi juga oleh motivasi dan sikap penerima terhadap pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan motivasi belajar dan perencanaan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin secara berkelanjutan. Guru dapat dilibatkan sebagai mentor atau pendamping siswa penerima KIP untuk memantau perkembangan belajar serta penggunaan bantuan pendidikan. Selain itu, edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan lanjutan perlu diperkuat agar dukungan keluarga terhadap keberlanjutan pendidikan anak semakin meningkat.

d) Reformasi Struktur Birokrasi Implementasi PIP

Reformasi tata kelola birokrasi implementasi PIP diperlukan untuk mengatasi kompleksitas administrasi dan ketidaktepatan sasaran penerima. Penyederhanaan prosedur administratif pencairan bantuan akan mempermudah akses bagi siswa penerima. Integrasi dan pemutakhiran data antara DTKS dan Dapodik secara berkala penting untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan melalui mekanisme monitoring, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan dana perlu diterapkan agar bantuan digunakan sesuai tujuan pendidikan. Penyusunan petunjuk teknis implementasi PIP yang adaptif terhadap karakteristik wilayah pedesaan juga diperlukan agar kebijakan lebih kontekstual dengan kondisi Kecamatan Gringsing.

e) Integrasi PIP dengan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

Agar dampak Program Indonesia Pintar tidak hanya bersifat akses tetapi juga kualitas, diperlukan integrasi dengan program peningkatan mutu pendidikan. Pendampingan akademik bagi siswa penerima bantuan dapat membantu meningkatkan prestasi belajar dan mencegah risiko putus sekolah. Dukungan terhadap kegiatan pengembangan diri, seperti ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan, dan kegiatan penguatan karakter, juga penting bagi siswa dari keluarga miskin. Selain itu, penguatan pendidikan vokasional dan keterampilan hidup perlu dikembangkan agar penerima PIP memiliki kesiapan melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi, ketepatan sasaran,

serta dampak jangka panjang Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat di Kecamatan Gringsing. Pendekatan yang menekankan perbaikan komunikasi, kapasitas pelaksana, motivasi penerima, tata kelola birokrasi, serta integrasi dengan program pendidikan lainnya akan menghasilkan implementasi PIP yang lebih optimal dan berkelanjutan.

## PENUTUP

Secara keseluruhan, implementasi Program Indonesia Pintar melalui analisis George Edwards III di Kecamatan Gringsing belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh kelemahan komunikasi, keterbatasan sumber daya, disposisi penerima yang belum mendukung, serta struktur birokrasi yang kompleks. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas program dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, perbaikan implementasi PIP memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan komunikasi kebijakan, penguatan kapasitas pelaksana dan penerima, reformasi prosedur birokrasi, serta integrasi program bantuan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan perbaikan tersebut, Program Indonesia Pintar diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pemerataan dan kualitas pendidikan di Kecamatan Gringsing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. [https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC\\_pOQC](https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC)
- Donahue, A. K. (2003). Ethics and public policy. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, 469–473.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. <https://books.google.co.id/books?id=nQtHAAAAMAAJ>
- Indriani, K. (2023). Implementasi Kebijakan Distribusi Kartu Indonesia Pintar Kepada Siswa SMP Di Kabupaten Bantul. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*,



- 12, 61–74.  
<https://doi.org/10.21831/sakp.v12i1.18118>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). Kartu Indonesia Pintar. *Indonesiapintar.Kemdikbud,Go,Id*.  
<https://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a methode source book*. SAGE Publications, Inc.
- Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2018). *Permendikbud-9-Tahun-2018-Ttg-Perubahan-Permendikbud-19-Tahun-2016-Ttg-Juknis-PIP.compressed*.
- Setyawati, S. (2018). Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bagi Siswa SMK Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar). *Iain Purwokerto : Skripsi, 12, :1-106*.  
<https://eprints.uinsaizu.ac.id/3408/2/SARAS~1.pdf>
- Sufni, N. (2024). *Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia. 2(2), 38–45*.
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003\_compressed-1.pdf* (p. 710).
- Wilson, J. Q. (1989). *Bureaucracy: What Government Agencies Do and why They Do it*. Basic Books.  
<https://books.google.co.id/books?id=I7DW2BVUULgC>